



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

# PRESS CABLE

NOMOR : 232/15122008  
HARI : SENIN  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
	Indonesia says New Zealand trade deal request intolerable, 'peanuts'	3
	Presiden SBY Pemberlakuan Piagam ASEAN	4
	Badan HAM Seimbangkan Promosi dan Perlindungan	4
	Indonesia Hargai Upaya Internasional Angkat Isu Lingkungan	5
	Oposisi Thailand Yakin Menang	6
	Temu Wayang Asia: China, Jepang, dan India Dukung Wayang	7
	Abhisit: KTT ASEAN Bulan Februari	7
	WHO Setujui Mekanisme Baru Virus Sharing	8
	Asean Sepakati Perjanjian Liberalisasi Tiga Sektor	8
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
	<b>A. POLITIK</b>	
	Further cut of premium gasoline price not to raise popularity	9
	<b>B. EKONOMI</b>	
	Deperin Usulkan Impor Enam Produk Diperketat	10
	EKSPOR-IMPOR Pasar Internasional Tolak Kayu Ilegal	10
	Flight ban may be lifted as early as March: Official	11
	Pemerintah bakal Lirik IMF Lagi	11

	<b>C.</b>	<b>SOSBUD</b>	
		RI Raih Dua Penghargaan Internasional Bidang Teknologi	12
		Olimpiade Internasional Gengsi buat Bangsa, Juga Melibatkan Perguruan Tinggi	12
	<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	--
	<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	
		PENEGAKAN HUKUM 2008 Pemerintah Belum Perlihatkan Prestasi Hebat	13
	<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA</b>	--
	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
		Indonesia - Inggris Kerjasama Perubahan Iklim	14
	<b>III.</b>	<b>ARTIKEL</b>	
		“Deklarasi Djuanda” 13 Desember Perjalanan Panjang Menuju Negara Kepulauan (Oleh Suhana)	15
		Indonesia is on the right track in its fight against terrorism (by S.P. Seth)	16
	<b>IV.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	--
	<b>V.</b>	<b>EDITORIAL</b>	
		Korupsi Mantan Presiden	18

Jakarta, 15 Desember 2008  
Sub Direktorat Berita  
Direktorat Informasi dan Media

## I. INTERNASIONAL :

### 1. Indonesia says New Zealand trade deal request intolerable, 'peanuts'

Indonesia has accused New Zealand of giving "too few" while requesting "too many" special facilities that may harm certain Indonesian industries and cause massive job losses, during an ongoing free trade negotiation that could end in a deadlock.

The negotiation is part of an auxiliary deal under the planned free trade agreement (FTA) between 10-member ASEAN and Australia and New Zealand, agreed upon on Aug. 28, and which will be officially signed by the end of the year.

Sondang Anggraini, the Trade Ministry's director for ASEAN, East Asia, Australia and the Pacific, and North and South America, argued New Zealand's request was too much to tolerate and only offered "peanut" facilities in exchange.

She said New Zealand had asked Indonesia to entirely eliminate import duties imposed on beef and dairy products, covered by 12 tariff lines by 2020, while in exchange offering only 10 doctoral scholarships.

Another offer is financial assistance for three years to improve the skills of Indonesians working in the dairy and beef industries, including veterinarians, Sondang said.

"But we dismiss their offers because scholarships are not among our priorities, and the amount of the financial assistance is so small that I'm ashamed to name the figure," she told *The Jakarta Post*.

Beef and dairy products are currently subject to import duties of an average 5 percent.

Analysts say the duty elimination would send local dairy and meat producers into immediate bankruptcy because they were still in a developing stage and would not be able to compete against overseas products.

The Agriculture Ministry estimates some 20,000 workers are directly employed in the country's dairy and meat sector.

Indonesia trade with New Zealand January-August		
	2007	2008
Exports	US\$212.36m	\$415.11m
Imports	\$328.97m	\$556.08m
Total	\$541.33m	\$971.19m

Source: Trade Ministry

Indonesia imported 7,942 tons of meat from New Zealand in the first six months of this year, making it the second largest meat seller in Indonesia after Australia, ministry data shows.

Total imports of meat and carcasses from New Zealand amounted to 64,000 tons last year.

Another offer from New Zealand also includes employing from Indonesia 100 chefs, 100 semi-skilled nurses and oil and gas pipe welders, 20 language teaching assistants and 20 butchers skilled in the halal slaughtering of cattle.

However, Guntur Witjaksono, director of the Manpower and Transmigration Ministry's international cooperation center, said the New Zealand government was still reluctant to open the door by refusing to guarantee worker placement.

"The New Zealand government refuses to guarantee placement for our future workers there as proposed in the free trade deal, leaving it up to New Zealand employers," he said.

Guntur expressed disappointment over the New Zealand government's proposal, comparing it to a deal with Japan under the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), which allows Indonesia to send 220 nurses to Japan during the first year of the deal, with a quota increase each year.

"If these problems are not resolved, I don't see any good reason for us to have a trade deal with New Zealand."

New Zealand deputy ambassador to Indonesia Chris Langley would not comment on the issue, saying it was still in the treaty-making process. (The Jakarta Post)

## **2. Presiden SBY Pemberlakukan Piagam ASEAN**

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri peresmian pemberlakuan Piagam ASEAN di Sekretariat ASEAN Jakarta, Senin (15/12) pagi.

Piagam ASEAN adalah payung hukum ASEAN yang akan mengubah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara itu dari organisasi berbasis elit menjadi masyarakat.

Piagam ASEAN mula-mula akan diresmikan pemberlakuannya di pertemuan puncak ke-14 ASEAN di Chiang Mai, Thailand, pada Desember 2008.

Namun karena krisis politik berkepanjangan di negeri gajah putih itu yang berujung pada pemberhentian perdana menteri, maka Thailand selaku ketua ASEAN periode 2008-2009 mengundurkan acara pertemuan puncak tersebut hingga Maret 2009.

Mengingat mendesaknya pemberlakuan Piagam ASEAN--yang telah dinantikan ASEAN selama 41 tahun--maka Indonesia mengusulkan agar peresmian pemberlakuan Piagam ASEAN itu tetap diselenggarakan sesuai acara di Sekretariat ASEAN.

Pada acara yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB itu juga dilakukan mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang mendiang mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas--meninggal pekan lalu, yang dua tahun terakhir telah menggondok embrio Piagam ASEAN.

Selain dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, tampak juga sejumlah duta besar negara sahabat.

ASEAN terdiri atas Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, Filipina, Laos, dan Vietnam.

Seusai menghadiri acara tersebut, Presiden Yudhoyono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. (Jurnal Nasional)

## **3. Badan HAM Seimbangkan Promosi dan Perlindungan**

Mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Makarim Wibisino mengatakan bahwa Badan HAM ASEAN harus bertugas menyeimbangkan upaya promosi dan perlindungan HAM di Asia Tenggara.

"Kita harus mulai menyatukan ide dan mempromosikan nilai HAM dari dalam. Ketika situasi kondusif tercipta, barulah upaya perlindungan dilakukan," kata Makarim dalam pidatonya pada seminar "Peran Badan HAM ASEAN untuk Menjaga Perdamaian dan Stabilitas di Kawasan" di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Makarim, Badan HAM ASEAN dapat menciptakan kepedulian umum terhadap HAM di antara masyarakat ASEAN dan mempromosikan pendidikan HAM dengan menyebarkan informasi berkaitan dengan pembangunan norma HAM. Ini antara lain bisa dilakukan melalui seminar, konferensi dan pertemuan lain antara kalangan pemerintah, akademisi dan organisasi masyarakat.

Sekalipun terdapat berbagai perbedaan di antara anggota ASEAN, Makarim menilai ASEAN seharusnya memiliki sejumlah cita-cita sama. "Saya sangat yakin, kita memiliki kapasitas berjuang dengan sadar dan berkelanjutan serta tidak membiarkan perundingan mengenai badan tersebut menghalangi potensi kerja sama kita," katanya.

Pembicara lain, yaitu Wakil Direktur Direktorat Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN Departemen Luar Negeri Ade Padmo Sarwono dalam paparannya menjelaskan latar belakang kesepakatan upaya promosi dan perlindungan HAM di kawasan itu melalui pembentukan Badan HAM ASEAN. Ini tercantum dalam pembukaan dan pasal 14 Piagam ASEAN, yang telah disepakati dan ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura tahun lalu oleh 10 kepala negara/pemerintahan ASEAN.

Gugus Tugas Badan HAM ASEAN dibentuk pada 20 Februari 2008 untuk menyusun kerangka acuan Badan HAM ASEAN guna diserahkan kepada para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-14 ASEAN sebagai panduan.

#### **Ditunda**

KTT ke-14 ASEAN, yang sedianya digelar di Thailand pada pertengahan Desember ini, terpaksa ditunda menyusul krisis politik yang terjadi di negara Gajah Putih tersebut.

Juru bicara pemerintah Thailand Nattawut Saikaur mengakui, KTT itu ditunda dari Desember 2008 menjadi Maret 2009. Penundaan itu dilakukan setelah Mahkamah Agung membubarkan tiga partai pilar pemerintah dan melarang Perdana Menteri Somchai Wongsawat melakukan aktivitas politik selama lima tahun.

"Pertemuan puncak ASEAN telah ditunda hingga Maret tahun depan," kata Nattawut Saikaur setelah pertemuan terakhir kabinet Somchai di kota bagian utara Thailand, Chiang Mai.

Pertemuan puncak itu dijadwalkan diselenggarakan pada 15-18 Desember, juga di Chiang Mai. Pertemuan puncak itu telah dipindahkan dari Bangkok akibat ketegangan yang meningkat sejak para pengunjung rasa menduduki bandara internasional ibukota.

Piagam ASEAN, sebagai wujud komitmen ASEAN terhadap upaya untuk mempromosikan demokrasi dan HAM yang dijadwalkan ditandatangani dalam pertemuan puncak itu, akhirnya ditandatangani di Indonesia.

"Kabinet menyetujui usulan kementerian Luar Negeri untuk mendeklarasikan Piagam ASEAN di Jakarta dan kementerian akan menulis surat guna menginformasikan hal itu kepada anggota ASEAN," kata Nattawut.

Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN dan mantan Menteri Luar Negeri Thailand, mengatakan bahwa dia belum diberitahu mengenai keputusan tersebut.

"Saya belum mengetahui itu. Saya masih menunggu keputusan," katanya melalui telepon dari Hong Kong. "Namun sejauh ini saya mengetahui bahwa tidak ada pemerintahan di Thailand sekarang sehingga Kementerian Luar Negeri harus menangani isu ini."

Thailand saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Bergilir ASEAN. Para pemimpin ASEAN telah dijadwalkan untuk bertemu dalam pertemuan puncak itu dengan para pemimpin dari Asia Timur serta sejumlah organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF dan Organisasi Perdagangan Dunia.

Surin sendiri mengakui bahwa Thailand tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan puncak itu seraya menambahkan bahwa sebuah penundaan akan membuat persiapan lebih baik.

ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. (Suara Karya)

#### **4. Indonesia Hargai Upaya Internasional Angkat Isu Lingkungan**

Dirjen Amerika dan Eropa Deplu RI, Retno L.P. Marsudi, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menghargai upaya internasional menjadikan pendekatan isu lingkungan hidup sebagai arus utama dalam kebijakan ekonomi pemerintah negara-negara di dunia.

Hal itu disampaikan Retno Marsudi dalam Workshop *Promoting Sustainable Palm Oil* yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin bersama Departemen Pertanian RI, ujar Sekretaris Satu KBRI Berlin, Agus Priono, kepada koresponden ANTARA News di London, Minggu.

Dikatakannya, workshop itu dihadiri sekitar 60 peserta dari berbagai kalangan di Jerman seperti pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengusaha, dan media.

Retno Marsudi mengatakan, disaat yang sama semua pihak/negara hendaknya juga menghormati prinsip *right to development* bagi semua bangsa, yang telah diakui secara internasional.

Menurut dia, Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi di bidang lingkungan yang ditunjukkan dengan kepemimpinan Indonesia menjadi tuan rumah konferensi para pihak kerangka perubahan iklim global di wah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (COP 13 UNFCCC) di Bali pada 2007.

Dikatakannya, upaya keras pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan jalannya perundingan yang pada akhirnya menghasilkan *Bali Roadmap*.

Sebagai Troika bersama Polandia dan Denmark, maka Indonesia juga terus berupaya dalam mensukseskan negosiasi sampai COP 15 di Kopenhagen, ujanya.

Oleh karena itu, ditegaskannya kembali kebijakan lingkungan hidup pada tingkat nasional, termasuk dalam pengembangan kelapa sawit, dipastikan akan sejalan dengan komitmen tersebut. (ANTARA)

## **5. Oposisi Thailand Yakin Menang**

Oposisi Thailand, Partai Demokrat, optimistis menang dalam pemilihan PM yang digelar hari ini. Keyakinan ini berdasarkan prediksi mereka tentang banyaknya anggota parlemen dari partai berkuasa yang membelot untuk mendukung oposisi.

Sikap oposisi itu diutarakan kemarin, setelah mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra memberikan pidato di hadapan 50.000 pendukungnya dan mendesak militer tidak intervensi dalam politik. Pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva dan pendukung Thaksin terus berlomba menggunakan menit-menit terakhir untuk melobi anggota parlemen yang belum memutuskan dukungannya.

Sebuah harian di Thailand melaporkan, menjelang pemilihan PM, satu suara anggota parlemen dihargai 50 juta baht (USD1,4 juta) atau senilai Rp16,4 miliar. Abhisit sangat berambisi merebut kursi PM. Partai oposisi mengklaim telah mendapatkan dukungan 260 anggota parlemen dari 480 jumlah total kursi dewan perwakilan rakyat.

"Semakin banyak (Thaksin) bicara, itu membuat anggota parlemen semakin tidak nyaman. Ini bukan tentang pengkhianatan, ini tentang sebuah keputusan demi bangsa," ujar Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Demokrat Suthep Tuangsuban.

"Saya yakin bahwa Abhisit akan mendapat dukungan lebih dari separuh total anggota parlemen dan dapat membentuk pemerintahan baru," tukasnya. Abhisit menegaskan bahwa dia siap segera bekerja untuk mengatasi krisis ekonomi di Thailand yang memburuk akibat enam bulan aksi unjuk rasa oposisi.

"Jika Partai Demokrat berpeluang membentuk pemerintahan, kami akan memulihkan kepercayaan dalam dua atau tiga bulan ke depan," ujarnya. Sejumlah partai kecil, termasuk bekas anggota koalisi berkuasa, kemarin menyatakan dukungannya terhadap Abhisit dalam pemilihan di parlemen hari ini.

"Anggota parlemen dari sembilan partai akan mendukung Abhisit (sebagai PM baru Thailand) dalam pemilihan yang dijadwalkan mulai pukul 9.30 pagi waktu setempat (hari ini)," ungkap Pradit Pataraprasit, Sekjen Ruam Jai Thai Chart Pattana. Ini merupakan pemilihan PM baru yang ketiga dalam empat bulan terakhir, menggantikan PM Somchai Wongsawat yang dipaksa lengser oleh pengadilan.

Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Somchai karena terbukti melakukan kecurangan pada pemilu Desember 2007 lalu. PPP kemudian berganti nama menjadi Puea Thai (Partai untuk Rakyat Thailand) dan berharap mendapat dukungan di parlemen.

Puea Thai sebelumnya secara tidak langsung mendapat dukungan moril dari Thaksin melalui pidato politik pada Sabtu (13/12) malam. Dalam rekaman pidatonya yang berdurasi 20 menit itu, Thaksin menyerukan rekonsiliasi nasional di Thailand. Mantan PM yang sekarang di pengasingan itu juga mendesak militer Thailand agar tidak melakukan intervensi di parlemen.

"Saat ini, militer tengah melakukan intervensi. Pihak yang melakukan intervensi dalam pembentukan pemerintah harus berhenti dan menarik diri," ungkap Thaksin melalui rekaman video di depan lebih dari 50.000 pendukungnya yang memadati Stadion Nasional Bangkok.

Thaksin menuduh militer menjadi dalang terjadinya pembelotan anggota parlemen dari bekas koalisi partai berkuasa. Menurut Thaksin, militer menggunakan keputusan pengadilan untuk memecah belah politisi bekas koalisi berkuasa. "Mereka (militer) seharusnya bersikap sportif dan tidak mengintervensi," tandas Thaksin.

Pidato politik Thaksin itu merupakan penampilan kedua kalinya di depan publik sejak meninggalkan Thailand pada Agustus lalu. Thaksin divonis dua tahun penjara melalui peradilan in absentia atas skandal korupsi.

Militer Thailand langsung merespon tuduhan intervensi dari Thaksin itu kemarin. Juru bicara militer Thailand Kolonel Sunern Kaewkumnerd kemarin menyangkal bahwa militer terlibat dalam politik "dagang sapi." "Kami tidak melakukan intervensi politik. Kami hanya menyatakan ini tugas

parlemen dan apa pun keputusannya, mereka seharusnya memikirkan kepentingan negara,” tukas Sunsern.

Kepolisian Bangkok akan mengerahkan sekitar 1.200 personelnya di sekitar gedung parlemen untuk mengantisipasi unjuk rasa, dari pendukung maupun dari kelompok anti-Thaksin. Kepolisian Bangkok juga akan meminta bantuan militer kalau terjadi bentrokan antardemonstran. (Koran Sindo)

## **6. Temu Wayang Asia: China, Jepang, dan India Dukung Wayang**

Tiga negara peninjau Sidang II ASEAN Puppetry Association, yakni China, Jepang, dan India, siap mendukung pelestarian dan pengembangan kesenian boneka, termasuk wayang, di negara ASEAN. Dukungan itu dinyatakan dalam nota kesepahaman dengan APA, Minggu (14/12).

Dalam penandatanganan kerja sama pada acara Asia Puppetry Gathering di Hotel Garuda itu, delegasi China, Jepang, dan India masing-masing diwakili Tang Dayu, Mariko Yoshida, dan Ranjana Pandey. Adapun pihak ASEAN Puppetry Association (APA) diwakili Ketua Presidium APA Solichin.

Karena baru sebatas ajang bertemu, belum ada pembicaraan teknis mengenai bentuk dukungan tiga negara besar itu terhadap kegiatan APA. Walau demikian, menurut Solichin, kesepakatan ini menjadi pijakan kuat agar kesenian boneka dan wayang bisa menembus panggung internasional.

Ranjana, Presiden Union Internationale de la Marionnette (Unima) atau asosiasi wayang dunia, mengatakan, kesenian boneka dan wayang dari negara ASEAN akan diusahakan masuk dalam festival budaya di India tahun 2010.

Sidang 10 negara ASEAN yang berlangsung Sabtu dan Minggu itu secara garis besar menghasilkan empat kesepakatan.

Pertama, setiap negara harus memiliki sanggar boneka/wayang. Kedua, memperbanyak pertukaran pentas. Ketiga, menyusun buku wayang untuk diluncurkan dalam Sidang IV APA tahun 2010. Kesepakatan keempat, menentukan tuan rumah sidang APA tahun 2009 dan 2010 adalah Filipina dan Malaysia.

Dalam pembukaan Festival Wayang Indonesia II, sekaligus Sidang II ASEAN Puppetry Association, Sabtu di Pagelaran Keraton, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, wayang adalah juga harkat martabat bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan terpapar dalam cerita wayang. (Kompas)

## **7. Abhisit: KTT ASEAN Bulan Februari**

Pemimpin Partai Demokrat Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan, jika terpilih menjadi perdana menteri dia akan memajukan jadwal Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 ASEAN, dari bulan Maret menjadi bulan Februari. Langkah itu akan diambilnya untuk memulihkan kepercayaan negara-negara sahabat terhadap Thailand.

“Thailand siap menyelenggarakan KTT,” katanya kepada media Thailand, Jumat (12/12). Dia juga menegaskan pemerintahannya akan mengutamakan ASEAN dan peran Thailand sebagai ketua. Dia menjamin ke-35 dokumen ASEAN disetujui Parlemen dan siap pada saat KTT pada awal Februari

“Semua persiapan sudah selesai, termasuk dokumen-dokumen,” katanya sambil menambahkan awal Februari merupakan waktu yang tepat, meski beberapa anggota ASEAN menginginkan KTT berlangsung di bulan Januari

ASEAN akan menyelenggarakan sesi khusus di sekretariatnya di Jakarta untuk membahas KTT. Sesi khusus tersebut akan diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kamboja dan Singapura menyarankan agar KTT diselenggarakan secepatnya. PM Singapura Lee Hsien Loong menggambarkan penundaan tersebut sebagai kemunduran bagi Asia Tenggara. PM Kamboja Hun Sen bahkan mendesak Thailand melepaskan posisi ketua, karena penundaan KTT akan berdampak pada banyak proyek kerja sama. Jabatan Ketua ASEAN merupakan posisi bergilir sesuai alfabet nama negara. Sesuai dengan Piagam ASEAN, setiap negara anggota bergiliran menjabat Ketua selama dua tahun. Sebelumnya, KTT dijadwalkan berlangsung 15-18 Desember di Chiang Mai, namun ditunda karena demonstrasi anti-pemerintah Thailand menduduki dua bandara Bangkok.

### **Pemilihan PM**

Sementara itu menjelang pemilihan PM baru Thailand yang akan diselenggarakan Senin (15/12) pekan depan, demonstran pimpinan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) mengancam

untuk terus melakukan aksi menentang kandidat dukungan Partai Pheu Thai. Partai Pheu Thai merupakan “penjelmaan” dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan kecurangan pemilu. Partai tersebut merupakan kumpulan para pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan kudeta militer pada September 2006 dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Sinar Harapan)

#### **8. WHO Setujui Mekanisme Baru Virus Sharing**

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) akhirnya sepakat terhadap mekanisme baru sharing dan benefit sharing dari virus H5N1. Selain itu, WHO juga menyepakati mekanisme baru penanganan flu burung (avian influenza/AI) yang disebut Jaringan Mekanisme Influenza WHO untuk menggantikan Jaringan Surveilans Influenza Global. Kesepakatan itu tertuang dalam The Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM-PIP) di Jenewa pada 8–13 Desember 2008.

Dalam pertemuan itu, negara-negara maju menyetujui mekanisme baru virus sharing dengan sistem standard material transfer agreement (SMTA). SMTA adalah dokumen yang akan mengatur semua transfer virus maupun bagian-bagiannya yang berbentuk standar dan universal dan mempunyai kekuatan hukum.

SMTA jika telah disahkan dan berkekuatan hukum akan mengubah secara radikal tatanan penggunaan virus dalam sebuah kerangka yang lebih adil, transparan, dan setara. Sistem ini akan membuka akses transparan terhadap informasi virus influenza yang berarti membuka peluang besar untuk para peneliti negara berkembang meningkatkan kapasitas penelitiannya.

Dengan demikian, Indonesia dan negara berkembang lain dapat mengembangkan alat diagnostik, vaksin, dan obat-obatan terhadap virus flu burung. Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah Supari yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan ini, didampingi Wakil Ketua Delegasi Indonesia Dr Widjaja Lukito dan Penasihat Hubungan Internasional Departemen Kesehatan (Depkes) Makarim Wibisono, mendesak agar WHO menyepakati mekanisme baru ini.

Menurut Wakil Ketua Delegasi Indonesia Dr Widjaja Lukito, pencapaian utama yang diraih pada IGM ini adalah disetujuinya penggunaan dalam sistem virus sharing. Pencapaian kedua, prinsip-prinsip SMTA secara umum disetujui oleh semua negara anggota, termasuk pengakuan atas perlunya mengintegrasikan sistem benefit sharing ke dalam SMTA yang telah gigih diperjuangkan Indonesia.

“Juga dengan dukungan negara-negara berkembang lain, terutama 11 negara SEARO (South East Asia Regional Organization), Brasil, AFRO (African Regional Office). Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menentang memperlakukan benefit sharing setara dengan virus sharing,” kata Widjaja seperti rilis yang diterima SINDO kemarin.

Tepatnya, kata dia, pernyataan IGM berbunyi, “Negaranegara anggota setuju untuk berkomitmen berbagi virus H5N1 dan virus influenza lainnya yang berpotensi pandemis serta menganggap virus sharing setara benefit sharing sebagai bagian penting dari langkah kolektif demi kesehatan publik secara global.”

Terobosan ketiga, ujar Widjaja, adalah integrasi prinsip benefit sharing ke dalam SMTA. Terobosan keempat, adanya komitmen negara maju untuk benefit sharing secara nyata, termasuk dalam berbagi risk assessment dan risk response. Terobosan kelima, terwujudnya virus tracking system dan advisory mechanism untuk memonitor dan mengevaluasi virus dan penggunaannya.

“Bahkan telah disetujui untuk meninggalkan sistem global influenza surveillance network WHO yang telah berlaku selama 60 tahun dengan mekanisme baru dan nama baru. Dengan demikian mengubah tatanan berbagi virus dalam dunia kesehatan,” tuturnya. Sementara itu, Makarim Wibisono dalam pernyataannya kepada sidang mengungkapkan penghargaan kepada AS yang bersikap konstruktif.

Wakil negara-negara Afrika, yaitu dari Nigeria, memberi penghargaan bahwa kemajuan perundingan yang dicapai ini terjadi karena AS dan Indonesia telah melangkah semakin mendekat dan memperkecil perbedaan pendapat di antara mereka. (Koran Sindo)

#### **9. Asean Sepakati Perjanjian Liberalisasi Tiga Sektor**

Menteri Ekonomi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) akan menandatangani perjanjian kerjasama liberalisasi bidang perdagangan barang, jasa dan investasi untuk mencapai penyatuan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) pada 2015.

"Pada tanggal 16 Desember 2008, para Menteri Ekonomi ASEAN akan bertemu di Singapura dengan agenda utama penandatanganan beberapa kesepakatan dan perjanjian penting sebagai pelaksanaan cetak biru AEC," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Senin.

Mendag menjelaskan perjanjian perdagangan barang ASEAN yang akan ditandatangani merupakan kumpulan dari perjanjian perdagangan barang termasuk program pengurangan atau penghapusan tarif dan non tarif menjelang 2010.

"ASEAN Trade in Good Agreement itu juga mencakup revisi aturan asal barang (rules of origin) dan implementasi agenda fasilitasi perdagangan antara lain National Single Window," tuturnya.

Negara-negara ASEAN juga sepakat untuk mengurangi hambatan investasi menjelang 2010 dalam 3 tahap yang dituangkan dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). ACIA merupakan revisi dan gabungan dari ASEAN Investment Agreement and International Guarantee Agreements.

Untuk meningkatkan liberalisasi di 65 sub sektor jasa dengan jadwal yang terarah maka akan ditandatangani kerangka kerja perjanjian bidang jasa ASEAN yang ke-7.

Pada Senin (15/12) ini, Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu di sekretariat ASEAN di Jakarta untuk mensahkan berlakunya Piagam ASEAN.

Piagam tersebut akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi berdasarkan aturan jelas dan lebih terstruktur serta memungkinkan untuk terciptanya komunitas politik dan keamanan ASEAN serta komunitas ekonomi dan sosial budaya ASEAN.

Seharusnya ASEAN menggelar Konferensi Tingkat Tinggi di Thailand namun akhirnya dibatalkan karena terjadi pemblokiran bandar udara internasional oleh demonstran. (ANTARA)

I | | .

## **NASIONAL :**

### **A. POLITIK :**

#### **1. Further cut of premium gasoline price not to raise popularity**

The government's decision to lowering further premium gasoline price from Rp5,500 to Rp5,000 per liter to be effective from December 15, 2008 or Sunday night (00.00 local time-WIB) was not aimed at stepping up the (president's) popularity, a spokesman said.

Chairman of the Indonesian Democrat Party Executive Board, Anas Urbaningrum made the remarks here on Sunday, adding that the decision was aimed at boosting the real sector and anticipating the impact of the global financial crisis.

"The further lowering of the fuel oil was also to reduce the people's cost of living," Anas said when commenting on the government's decision to lower further the price of subsidized premium gasoline by Rp500 to Rp5,000 per liter.

The government, on December 1, 2008, cut the premium gasoline price from Rp6,000 to Rp5,500 per liter after global crude prices in recent weeks declined to below US\$60 per barrel.

"This proves that the government shows its concern and care for the people. This (decision) is not for a campaign for next year's general elections or to raise (president Susilo Bambang Yudhoyono)'s popularity," Anas said.

In addition, Anas Urbaningrum said, whether or not the decision will lead to popularity, it depends on the people to judge.

"Let the people make a judgement. Should the people believe this is good, there's nothing wrong with it," Anas cited.

"It means that the gasoline price cut is not for a campaign. But the government made such decision to maintain the momentum of economic growth and the people's welfare. (ANTARA)

### **B. EKONOMI :**

### **1. Deperin Usulkan Impor Enam Produk Diperketat**

Departemen Perindustrian mengusulkan impor enam produk diperketat untuk mencegah impor ilegal. Keenam produk itu kosmetika, keramik, baja, lampu hemat energi, telepon genggam, busi dan filter, serta sepeda.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (15/12), mengatakan hal itu merupakan upaya pengamanan pasar dalam negeri dari ancaman meningkatnya impor ilegal selama krisis keuangan global.

Pada Oktober 2008, Menteri Perdagangan telah menerbitkan aturan impor yang diperketat untuk lima produk konsumsi yaitu garmen, alas kaki, mainan anak, elektronika serta makanan dan minuman.

Impor lima produk tersebut hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) melalui lima pelabuhan masuk yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makasar dan Belawan. Setiap impor harus diverifikasi di pelabuhan muat.

Rencananya aturan tersebut berlaku pada 15 Desember 2008 ini namun akhirnya ditunda hingga 29 Februari 2009. Selain memperketat aturan impor, Deperin juga mengusulkan kenaikan tarif Bea Masuk (BM) produk tertentu seperti produk baja hilir (kawat dan paku), petrokimia (polyethylen) serta rubber roll (gulungan karet).

Pada usulan sebelumnya, pada Oktober, Deperin juga mengusulkan produk furnitur dan kaca tuang juga masuk dalam daftar produk yang impornya diatur dengan ketat.

Untuk memperkuat penyerapan produk dalam negeri di pasar lokal, pemerintah menyiapkan instruksi presiden dan peraturan menteri perindustrian yang mewajibkan pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah agar menggunakan produk dan jasa dalam negeri.

"Dalam konsep Inpresnya juga akan diberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional," ujar Fahmi.

Sedangkan Peraturan Menteri Perindustrian akan menyebutkan daftar barang dan jasa yang tingkat kandungan komponen dalam negerinya sekitar 20% hingga 90% sebagai panduan penggunaan barang dan jasa dalam proyek pemerintah.

Hingga kini Deperin telah mengelompokkan 21 jenis barang dan jasa atau sekitar 456 barang yang memiliki kandungan komponen dalam negeri sekitar 20 sampai 90%. (Media Indonesia)

### **2. EKSPOR-IMPOR Pasar Internasional Tolak Kayu Ilegal**

Perwakilan dari Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Pemerintah Amerika Serikat (AS), dan Komisi Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan untuk kalangan industri pada 10 Desember 2008 lalu. Pertemuan itu membahas dasar aturan hukum bagi negara-negara pengimpor kayu, khususnya mengenai perdagangan produk kayu ilegal serta dukungan terhadap upaya Indonesia dalam menggalakkan perdagangan kayu yang legal.

Sebagai negara penghasil kayu dalam jumlah yang besar, Indonesia selalu aktif terlibat dalam upaya memperbaiki praktik-praktik pengelolaan hutan dan memberantas pembalakan liar (illegal logging). Pemerintah Indonesia sedang mengambil langkah yang besar untuk mendukung perdagangan secara legal melalui penyusunan standar hukum wajib bagi produk perikanan di segala sektor. Imbauan kerja sama internasional untuk memberantas pembalakan liar dan semua bentuk perdagangannya membuahkan hasil dengan dibentuknya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Banyak keuntungan substansial yang dapat diperoleh Indonesia dengan peraturan hukum internasional ini. Penerapannya akan mengurangi tingkat pembalakan liar, meningkatkan dukungan yang lebih besar bagi perusahaan yang menjalankan pengelolaan hutan secara menguntungkan dan berkesinambungan, serta menambah pemasukan baik dari pajak maupun dukungan bagi tata kelola sumber daya alam secara efektif.

Sebelumnya, Kongres AS mengesahkan peraturan yang penting dengan mengamandemen Lacey Act yang melarang perdagangan tumbuhan dan produk dari tumbuhan yang berasal dari sumber ilegal. Ini termasuk kayu dan produk kayu. "Lacey Act membantu AS meminimalkan masuknya tumbuhan dan produk kayu ilegal ke pasar AS. AS juga mendukung upaya negara lain untuk memberantas perdagangan tumbuhan secara ilegal," kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Cameron Hume. (Suara Karya)

### **3. Flight ban may be lifted as early as March: Official**

Indonesian airliners may be allowed to fly in European airspace by as early as March next year, with the government claiming of making significant improvement in safety measures as required by the European Commission, an official said Sunday.

"We hope the European Commission meeting in March next year can (lead to the lifting) of the flight ban," Budi Mulyawan Suyitno, the Transportation Ministry's director general of air transportation, said at a press conference.

The EC imposed the flight ban in mid-2007 on all Indonesian airlines due to safety concerns, following a series of fatal accidents involving Indonesian airplanes.

In response, Indonesia decided to delay signing a much-anticipated partnership and cooperation agreement (PCA) with the EU, and a comprehensive partnership agreement with the Netherlands.

The EC is the EU's executive branch, responsible for proposing legislation, implementing decisions, upholding the EU's treaties and the general day-to-day running of the EU.

Recommendations from two EU countries are sufficient to impose a flight ban, but approval from all 27 member states is needed to lift a ban.

According to Budi, 69 of 121 EU findings on the Indonesian aviation industry were related to air safety.

"We are confident about settling all of the findings before March next year," Budi said.

He added five major EU countries had announced their commitment to help lift the ban.

"Germany, France and the Netherlands will help us improve aviation safety, while the UK will advise us on regulatory systems, and Sweden on aviation industry planning," he said.

However, the Transportation Ministry has rejected calls by the EU to turn its air safety directorate into an independent agency to help the nation's aviation safety become more professional.

The Air Safety Certification Directorate (DSKU) currently falls under the ministry's directorate general for air transportation.

The EC says its current ban on Indonesian airliners from European airspace has a lot to do with shortcomings in terms of safety standards, in particular the country's air safety regulator.

Meanwhile, the ministry remains upbeat the local airline industry can still record high growth of 10 percent in terms of passengers next year, despite a slowdown in the global economy.

"Indonesian airlines have been able to maintain their load factor by an average of 80 percent this year despite rising ticket prices," Budi said.

Indonesia currently has 14 airlines operating 739 airplanes, a 36.3 percent increase on the 542 planes recorded in 2007. The airlines serve 167 domestic routes connecting 87 cities.

The ministry forecasts domestic passenger numbers this year to reach 46.34 million, up by 18.3 percent from 39.2 million last year. Overseas passenger numbers are predicted to rise by a slight 5.64 percent to 3.37 million this year, from 3.19 million last year.

Emirsyah Satar, president director of national flag carrier Garuda Indonesia, said the industry was forecast to book 10 percent growth in revenue next year, compared to the usual 15 percent.

Garuda is eyeing Rp 15 trillion (US\$1.28 billion) in revenue and around \$300 million in operating profits this year. (Kompas)

#### **4. Pemerintah bakal Lirik IMF Lagi**

Pemerintah kemungkinan akan mengambil pinjaman dana moneter internasional (IMF) jika cadangan devisa terus tergerus hingga di bawah US\$40 miliar.

"Jika cadangan devisa sudah mencapai angka kritis, di bawah US\$40 miliar, dengan amat terpaksa pemerintah akan meminjam ke IMF lagi. Ini langkah terakhir kalau pemerintah tidak mendapatkan bilateral swap arrangement," kata Pengamat ekonomi dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan di Jakarta, Minggu (14/12).

Menurutnya, satu-satunya sumber pendanaan yang cepat untuk menambah cadangan devisa adalah dari IMF. Lembaga ini dapat menyediakan dana US\$10 miliar sampai US\$20 miliar kepada Indonesia.

"Tapi saya menilai, pemerintah akan mengupayakan dulu peminjaman bilateral swap arrangement dengan AS, Jepang, China yang merupakan negara-negara yang punya banyak dollar. Kalau tidak dapat, baru ke IMF," jelas dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengisyaratkan penarikan bilateral swap arrangement dari tiga negara Asia, yaitu Jepang, China dan Korea, akan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu,

tidak hanya berdasarkan tingkat cadangan devisa yang dimiliki BI. Total bilateral swap ada 12 miliar dolar AS yakni Jepang US\$6 miliar, China US\$4 miliar, dan Korea US\$2 miliar.

Bilateral *swap arrangement* lebih dimaksudkan sebagai dana cadangan dan memberi ketenangan pada pasar bahwa likuiditas BI cukup untuk menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter.

Saat ini total cadangan devisa Indonesia mencapai US\$50 miliar atau telah menurun sekitar US\$10 miliar dari posisi tertingginya. BI mencatat adanya tambahan US\$2 miliar dari penarikan pinjaman pemerintah pada akhir tahun ini.

Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Dradjad Wibowo menyatakan berutang kembali ke IMF hanya akan memperburuk kondisi ekonomi. Karena manfaatnya hanya menaikkan cadangan devisa secara artifisial. "Uang dari IMF tetap tidak bisa dipakai, kecuali cadangan devisa habis," katanya.

Di sisi lain, resep-resep IMF terbukti merusak kekuatan sektor industri dan pertanian Indonesia serta memicu penguasaan asing secara berlebihan di sektor perbankan, energi dan pertambangan, dan retail. "Untuk negara sebesar Indonesia, penguasaan asing yang berlebihan seperti itu justru kontraproduktif," tegasnya. (Media Indonesia)

## C. SOSBUD

### 1. RI Raih Dua Penghargaan Internasional Bidang Teknologi

INDONESIA meraih dua dari lima kategori penghargaan pada anugerah penerapan teknologi terbaik tingkat Asia Pasifik IT Inspiration Awards I yang diselenggarakan Hitachi Data Systems.

Dua kategori itu, PT Indosat Tbk meraih penghargaan Diamond untuk *Most Efficient Use of Technology* melalui proyek konsolidasi *storage* dan pemulihan bencana. Lalu, Indra Utoyo, Direktur PT Telekomunikasi Indonesia meraih *CIO of the Year*.

"Hitachi Data Systems IT Inspiration Awards 2008 perdana ini dipersembahkan bagi kepemimpinan dalam setiap komponen penerapan teknologi. Teknologi itu dibutuhkan visi jelas untuk melihat bahwa teknologi *storage* itu agen perubahan meningkatkan performa bisnis. Bukan sekadar kapasitas yang makin murah," kata Hu Yoshida, *Vice President and Chief Technology Officer*, Hitachi Data Systems di Jakarta, Kamis pekan lalu dalam rilis yang diterima *Jurnal Nasional*.

Dia mengatakan, penghargaan pertama yang dimulai Agustus 2008 ini diharapkan menjadi pijakan bagi organisasi di Asia Pasifik menunjukkan pemanfaatan teknologi yang mampu mendorong bisnis.

Edwin Lim, *Country Manager* Hitachi Data Systems Indonesia mengatakan, dengan penghargaan ini Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di Asia Pasifik dalam pemanfaatan teknologi informasi terutama *storage* sebagai pendukung bisnis. "Semua nominator dari Indonesia sudah menerapkan praktik terbaik dalam mengembangkan teknologi *storage* hingga mampu mendorong laju bisnis." (Jurnal Nasional)

### 2. Olimpiade Internasional Gengsi buat Bangsa, Juga Melibatkan Perguruan Tinggi

Sedikitnya 34 jenis olimpiade internasional, mulai dari sains, seni, hingga olahraga, diikuti pelajar Indonesia dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Keikutsertaan Indonesia ke berbagai ajang internasional itu umumnya program pemerintah.

"Keikutsertaan pelajar Indonesia di berbagai olimpiade itu bisa dikatakan untuk gengsi bangsa ini. Apalagi ternyata pelajar kita membuktikan mereka mampu bersaing dengan pelajar dari negara lain dan memperoleh medali," kata Direktur Pembinaan SMA Depdiknas Sungkowo M di Jakarta, Sabtu (13/12).

Menurut Sungkowo, pemerintah mendanai keikutsertaan pelajar ke ajang olimpiade internasional yang diikuti puluhan negara dari berbagai benua. Pelajar yang mewakili Indonesia diseleksi secara berjenjang dari daerah, yang berprestasi di Olimpiade Sains Nasional.

Untuk SMA, olimpiade sains yang rutin diikuti antara lain International Mathematics Olympiad, International Physics Olympiad, International Biology Olympiad, International Chemistry Olympiad, International Astronomy Olympiad, dan International Earth Science Olympiad.

#### Melibatkan perguruan tinggi

Penyiapan pelajar Indonesia ke ajang olimpiade internasional ini juga melibatkan perguruan tinggi. Menurut Sungkowo, pemerintah ingin ada jaringan perguruan tinggi, terutama fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, dengan dinas pendidikan di daerah untuk membina anak-anak yang berpotensi.

Elvira, Koordinator Olimpiade Tingkat SD Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, mengatakan, siswa SD yang mewakili Indonesia diseleksi lewat jalur B di 33 provinsi.

Seleksi diadakan bulan Februari di masing-masing provinsi. "Kita sudah punya sistem tes yang bisa melihat bakat atau talenta anak di bidang matematika dan sains," kata Elvira.

Selain itu, panitia pusat olimpiade siswa SD juga memilih peraih medali emas atau terbaik teori dan praktik di ajang olimpiade sains nasional yang diselenggarakan Depdiknas setiap tahun. Dari seleksi jalur B dan pemenang olimpiade sains nasional, setiap tahun bisa didapat sekitar 27 siswa SD yang siap mewakili Indonesia di berbagai kompetisi sains tingkat internasional.

Menurut Elvira, olimpiade tingkat internasional di tingkat SD adalah International Mathematics and Science Olympiad (IMSO), International Mathematics Competition (IMC), Elementary Mathematics International Contest (EMIC), dan Polengku.

Dalam tes seleksi, siswa tidak dipilih berdasar IQ. Siswa yang punya nilai rata-rata 7,5 pada bidang matematika dan sains bisa mengikuti tes calon tim IMSO.

Siswa yang terpilih dibiayai untuk ikut beberapa olimpiade matematika dan sains—mereka didampingi satu guru dari sekolahnya. Menurut Elvira, saat ini banyak tawaran olimpiade dari suatu lembaga langsung ke sekolah-sekolah.

Prestasi Indonesia di ajang kompetisi sains ternyata mendongkrak minat siswa dan orangtua untuk ikut serta.

Untuk mendorong kepercayaan diri setiap anak ikut kompetisi sains, majalah sains komik Kuark menyelenggarakan Olimpiade Sains Kuark (OSK). Peminatnya terus meningkat karena semua anak boleh ikut. Tahun 2009 seleksi OSK dilaksanakan serentak di berbagai kota di Indonesia pada 7 Februari 2009 dengan target 60.000 siswa-siswi SD/MI se-Indonesia. Tahun lalu OSK diikuti 30.000 siswa. (Kompas)

**D. HANKAM : Tidak Ada**

**E. HUKUM :**

#### **1. PENEGAKAN HUKUM 2008 Pemerintah Belum Perlihatkan Prestasi Hebat**

Wakil Ketua Komisi III DPR (bidang hukum) Soeripto memberi nilai merah atas kinerja pemerintahan secara kualitatif untuk bidang hukum sepanjang tahun 2008.

"Kalau pendekatannya kualitatif untuk menilai kinerja pemerintah di bidang hukum pada tahun 2008 ini, nilainya merah," ujarnya saat berbicara dalam acara Dialektika Demokrasi di ruang wartawan Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat.

Dalam acara rutin yang mengambil tema "Refleksi Akhir Tahun 2008: Apa Yang Sudah Dikerjakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum " selain Soeripto, tampil sebagai pembicara lainnya adalah anggota FPDIP yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun dan pengamat hukum dari Fitra, Arif Nur Alam.

Menurut Soeripto, jika pemerintah benar-benar ingin menegakan supremasi hukum dalam artian kualitatif, maka akan banyak pejabat negara dan mantan pejabat yang jatuh bergelimpangan.

"Jadi secara umum rapat Presiden SBY dalam konteks penegakan hukum belum memperlihatkan prestasi yang hebat," kata politisi PKS itu.

Soeripto kemudian mengambil satu contoh tidak adanya komitmen pemerintah membongkar tuntas kasus mega korupsi BLBI/KLBI walaupun ada bukti-bukti baru yang mengemuka dalam persidangan kasus suap Artalyta Suryani dan mantan Jaksa Urip Tri Gunawan.

Padahal, ujarnya, yang diharapkan masyarakat adalah penegakan supremasi hukum seperti memberangus praktik korupsi dalam artian kualitasnya dan bukan sekadar kuantitas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan.

Dari perspektif kuantitas, Soeripto mengakui bahwa pemerintah mendapat rapat biru karena ada lebih dari 4000-an kasus tindak pidana korupsi yang diproses ke pengadilan.

Senada dengan Soeripto, Gayus Lumbuun berpendapat bahwa belum ada catatan signifikan yang berhasil ditorehkan pemerintahan Yudhoyono sepanjang tahun 2008.

Dia mengambil contoh masih banyaknya kasus ilegal logging, peredaran narkotika hingga backing kriminalitas yang belum tuntas ditangani.

"Belum lagi dengan adanya kasus-kasus salah tangkap yang sejak 2007 terdata tidak kurang dari 20 kasus. Angka itu adalah yang tercatat dan dipublikasikan di media massa saja," katanya.

Jadi, dia menyimpulkan, kinerja pemerintahan di bidang hukum sepanjang tahun 2008 masih masih jalan di tempat. (Suara Karya)

**F. OLAH RAGA : Tidak Ada**

**G. LINGKUNGAN HIDUP :**

### **1. Indonesia - Inggris Kerjasama Perubahan Iklim**

Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Rachmat Witoelar dan Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris Ed Miliband di sela-sela penyelenggaraan Konperensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC 14) di Poznan, menandatangani MoU untuk kerjasama kemitraan di bidang perubahan iklim.

Dalam penandatanganan MoU tersebut hadir Dubes RI untuk Republik Polandia Hazairin Pohan dan Anggota DPD RI Sarwono Kusumaatmadja, demikian siaran pers Kedubes RI di Warsawa, Senin.

Kedua negara sepakat membentuk suatu kelompok kerja untuk memperbaiki konservasi hutan, pengembangan pasokan energi terbarukan, meningkatkan cara-cara untuk penghematan energi, serta menyiapkan masyarakat setempat untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Menteri KLH Witoelar yang juga menjadi ketua delegasi RI untuk COP 14 menyatakan optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi hijau (green economics), pemajuan pencapaian MDGs dan pembangunan berkelanjutan dengan penciptaan lapangan kerja yang menjadi prioritas utama RI dapat dicapai.

"MoU yang kami tandatangani hari ini menjadi ikatan kemitraan dalam menjajagi semua kemungkinan dan pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim. Saya percaya kerjasama seperti ini akan memajukan pemahaman dan tindakan bersama kedua negara dalam mengatasi permasalahan", kata Rachmat.

Menteri Ed Miliband dalam kesempatan itu menyatakan perubahan iklim merupakan tantangan terbesar dunia dan generasi sekarang harus mengambil langkah.

"Kita akan berhasil apabila bangsa-bangsa bekerja sama antara pemerintah, jaringan bisnis dan masyarakat. Kita perlu saling belajar mengenai lingkungan yang kita hadapi bersama dan kesempatan yang tersedia serta solusi untuk mengatasi perubahan iklim," katanya.

Dalam MoU tersebut kedua pihak sepakat untuk menyiapkan kerangka konsultasi dan kerjasama dalam mengidentifikasi kesempatan dalam aktifitas penggunaan tanah kehutanan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation), memajukan manajemen berkelanjutan dalam produksi minyak sawit termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan

Selain itu, kedua belah pihak sepakat memberikan bantuan teknis tentang risiko iklim dan strategi adaptasi dalam rangka mengembangkan kemampuan adaptasi masyarakat lokal; menjajagi kesempatan untuk kerjasama pengembangan, penempatan, penyebaran dan transfer teknologi `low carbon` khususnya untuk energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi.

Penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak-lanjut dari komitmen yang dihasilkan pada pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Tony Blair pada bulan Maret 2006, dan pertemuan awal Forum Kemitraan RI - Inggris pada Januari 2007. (ANTARA)

**III. ARTIKEL :**

### **1. "Deklarasi Djuanda" 13 Desember Perjalanan Panjang Menuju Negara Kepulauan (Oleh Suhana)**

Desember adalah bulan bersejarah bagi Indonesia dan dunia. Dua peristiwa yang mengubah rezim kelautan nasional dan internasional terjadi di bulan ini. Pertama, Deklarasi Djuanda tanggal

13 Desember 1957, dan kedua, pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika.

Dalam deklarasi yang dibacakan Perdana Menteri Djuanda, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia.

Deklarasi tersebut juga menyebutkan bahwa lalu lintas yang damai melalui perairan-perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin, selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.

Berdasarkan deklarasi tersebut maka mulai saat itu, fungsi laut antara tidak lagi sebagai pemisah antarpulau-pulau Indonesia, tetapi berubah menjadi alat pemersatu bangsa dan sebagai wahana bagi pembangunan, keamanan, dan pertahanan nasional. Presiden Abruhrman Wahid kemudian menetapkan tanggal 13 Desember sebagai hari Kesatuan Nusantara Indonesia.

Selanjutnya, pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) pada 10 Desember 1982 berlangsung di Montego Bay, Jamaika. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi itu memberikan pengakuan terhadap negara kepulauan.

Indonesia berjuang selama 25 tahun dan berhasil gemilang merebut pengakuan masyarakat internasional atas konsepsi negara kepulauan. Namun dalam perjalanannya, sampai sekarang ini, bangsa ini masih saja dihadapkan pada tidak adanya kesamaan visi dalam membangun negara kepulauan.

#### **“Archipelagic Policy”**

Berdasarkan kedua peristiwa kelautan tersebut, negara kepulauan Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis yang melintang di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu BAsia dan Benua Australia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, baik di darat maupun di laut. Namun demikian, sampai saat ini berbagai keunggulan dan keunikan Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Catatan penulis dari beberapa kali forum diskusi yang membahas permasalahan negara kepulauan—termasuk diskusi di Sinar Harapan—terdapat beberapa permasalahan krusial yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertama, bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan negara kepulauan (archipelagic policy) yang terpadu. Kebijakan yang ada selama ini hanya bersifat sektoral, padahal pembangunan di negara kepulauan memiliki keterkaitan antarsektor yang tinggi.

Kedua, lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai negara kepulauan dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Apalagi, itu belum ditunjang dengan sumber daya manusia yang andal. Saat ini Indonesia hanya memiliki 0,8% sumber daya manusia (SDM) kelautan yang lulus S1, S2, dan S3.

Ketiga, bangsa Indonesia sampai saat ini belum menetapkan batas-batas wilayah perairan dalam. Padahal, wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh ada satu kapal asing pun yang boleh masuk ke perairan dalam Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki kedaulatan mutlak untuk mengelola sumber daya laut yang berada di wilayah perairan dalam

Keempat, pertahanan dan ketahanan negara dari sisi matra laut yang mencakup: (1) belum optimalnya peran pertahanan dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara; (2) ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEEI; (3) belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut; (4) masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut; (5) makin meningkatnya kegiatan terorisme, perompakan, dan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia; dan (6) masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum.

#### **Menuju “Archipelagic State”**

Ada lima tindakan yang mesti ditempuh untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertama, meningkatkan pemahaman pentingnya laut dari aspek geopolitik dan geostrategis kepada seluruh komponen. Sebagai negara kepulauan, Indonesia selayaknya

memiliki armada pengamanan laut yang andal dan kuat guna menjaga keutuhan NKRI dan sumber daya alamnya.

Kedua, mengubah orientasi pembangunan dari land based oriented menjadi archipelagic based oriented. Konsep archipelagic based oriented adalah mencakup darat, laut dan udara. Berdasarkan hal tersebut, strategi pembangunan 25 tahun ke depan harus berpatokan pada road map menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, dan didukung oleh pertanian yang maju dan industri yang modern

Ketiga, menentukan batas-batas wilayah perairan pedalaman dan menetapkannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Dengan adanya penetapan batas-batas perairan dalam tersebut, kapal-kapal negara lain tidak diperbolehkan melewati perairan tersebut tanpa kecuali. Selain itu, perlu juga dikaji tentang potensi yang terkandung dalam perairan pedalaman.

Keempat, mengembangkan sistem pendidikan berbasis kelautan pada sistem pendidikan nasional. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk mengalokasikan dana yang cukup bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan kelautan di wilayahnya dan menerapkan teknologi kelautan tepat guna kepada masyarakat khususnya nelayan.

Kelima, mempercepat penetapan garis batas antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya di kawasan laut. Beberapa yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah perbatasan dengan Filipina, khususnya di sebelah Selatan Mindanao antara Pulau Merampit, Mianggas, dan Marore yang oleh Filipina dianggap berada di dalam perairan yang termasuk dalam persetujuan Amerika-Spanyol 1898. Walaupun arbitrase Max Huber 1928 telah mengakui bahwa Pulau Mianggas adalah Pulau Hindia Belanda yang kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

Selain itu, juga menetapkan garis batas yang menghubungkan antara batas laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka dan antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura, khususnya garis batasnya di sebelah barat Pulau Nipah sampai ke ujung Selat Malaka, dan di sebelah timur antara Batam dengan Changi.

Dalam memperingati Hari Nusantara ini hendaknya semua unsur masyarakat, politisi, pemerintah, aparat keamanan dan semua stakeholders kelautan lainnya dapat berperan aktif untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat. Orientasi pembangunan ekonomi nasional berbasis kepulauan sudah merupakan kebutuhan yang mendesak. Demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.(Sinar Harapan)

## **2. Indonesia is on the right track in its fight against terrorism (by S.P. Seth)**

The reaction in Australia to the Bali bombers' execution was quite revealing. There was appreciation of Indonesia's task in tackling terrorism.

At the same time, there was some criticism too for allowing its perpetrators, Amrozi, Mukhlas and Imam Samudra, to project themselves as martyrs fighting for Islam.

To its credit, the Indonesian government has refused to be swayed by the fiery rhetoric of "Islam in danger". It has, through a mix of policies of toughness and persuasion, gone after the militants with good outcomes. By most accounts, the terrorist network is sufficiently wrecked for it to operate in any large way.

Obviously, one can never rule out sporadic acts of violence, especially in the wake of recent executions. But, on the whole, the situation seems quite under control.

While the government and its security agencies have maintained strict vigilance over the activities of extremists, a large part of the credit must go to the Indonesian people. Apart from a hard core of blood-baying militants and their sympathizers (not more than 2 percent of the population, to take a rough guess), Indonesians grow up in an eclectic cultural tradition.

The sectarian riots targeting Christians in some parts of Indonesia some years ago might seem to question this. But it is pertinent to remember that there were dark political forces behind this in the wake of Soeharto's fall.

The danger is that the extremist elements thwarted from terrorist violence, even though small in number, might raise the temperature by harping on sectarian issues as between Muslims and Christians. Prof. Jean-Pierre Filiu at the Institute for Political Studies in Paris has raised a bigger issue. He smells danger from the Hizb ut-Tahrir (an Islamic movement of the fifties, which grew up first in the Middle East), trying to mobilize people around the issue of reviving Caliphate.

In an article he wrote for *Le Monde diplomatique*, he dwelt on the history and dangerous potential of Hizb ut-Tahrir, particularly in Asia. According to him, "While there is little doubt that the

party has an extensive central Asian network \*apart from a strong base among some immigrant Muslim groups in Europe\*, its strongest base lies further to the east, in Indonesia."

He added, "In August 2007, tens of thousands of people demonstrated in support of the caliphate, filling a stadium in Jakarta."

Though Hizb ut-Tahrir is not regarded as a terrorist organization (apart from in some countries), its advocacy of reviving the political glory of the Caliphate (however far-fetched) has an innate appeal of sorts for many Islamic people across the board.

Having said that Hizb ut-Tahrir has been around for a long time, and is one of the many outfits in Indonesia and around the world competing for the Islamic faithfuls.

The point to make is that while the Susilo government has done a pretty good job so far of splintering the terrorist network, the biggest challenge is to maintain and strengthen Indonesia's eclectic cultural tradition.

While there is general appreciation of the way Indonesia is tackling terrorism, there is some criticism that during the long judicial process Amrozi, Mukhlas and Imam Samudra were allowed to perform to the public gallery through prison interviews etc to become celebrities of sorts.

There is some truth in this, although the authorities apparently didn't intend it to happen in this way. There could be three explanations for this.

One might be the lack of coordination between the agencies involved. Two: the lack of clarity regarding the procedures involved. Three: sometimes, with its young democracy, the Indonesian government seemingly tries too hard.

But what matters is that they were intent on doing the right thing in dealing with the perpetrators of the Bali carnage. Their execution, though, has created some controversy. It is not about whether or not they were guilty. They were indeed proud of what they did to become martyrs for their cause. The controversy is about the principle of capital punishment.

Australia is against capital punishment, although the Rudd government didn't seek to influence Indonesia's decision in the matter. Partly, it was because of respect for Indonesia's constitutional processes.

Besides, any sustained advocacy against their execution wouldn't have gone well at home. At the same time maintaining a principled position against capital punishment will allow Canberra to plead on behalf of the Australian drug mules on the death row in Indonesia.

Senator Barnaby Joyce of the National Party, however, succinctly put another reason for opposition to execution in a signed article in the *Sydney Morning Herald*. He wrote, "The execution of the three Bali bombers-Amrozi, his brother Mukhlas, and Imam Samudra-by firing squad provides their evil with an ongoing stage, and a rallying call for those who wish to achieve their twisted goals or emulate their actions." Which seemed to find some credence from Abu Bakar Baasyir's (head of the Jamaah Islamiyah) statement that: "Their (bombers') fighting spirit in defending Islam should be followed."

And he added, "We will win the fight in this world or die as martyrs. Even if they (bombers) are murdered, they will die as martyrs." One can never be sure of how events will take a turn in the future. But, going by the subdued popular reaction to the executions in Indonesia, it doesn't seem that they will turn into heroes and martyrs any time soon, if at all.

Indonesia appears to be doing the right thing in its fight against extremism and terrorism. And it is high time that the world gives it due recognition.

Of course, there is appreciation of it in Australia and elsewhere, but it doesn't seem to register adequately.(The Jakarta Post)

**IV. LAIN-LAIN : T i d a k**

**Ada**

**V. EDITORIAL :**

#### **1. Korupsi Mantan Presiden**

Ada banyak contoh yang berasal dari banyak negara bahwa politik cenderung dijadikan sebagai tempat mata pencaharian utama, tempat mencari nafkah.

Penetapan mantan Presiden Taiwan Chen Shui-bian dan istrinya sebagai tersangka korupsi menambah panjang contoh tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri.

Ketika berkuasa, mulai tahun 2000 hingga Mei 2008, Chen dikenal sebagai sosok pemimpin yang ketika berbicara di depan publik begitu karismatis. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang

suka membuat kebijakan populis. Ia pendukung kuat kemerdekaan Taiwan, lepas dari China. Namun, ia menyatakan tidak akan memproklamasikan Taiwan kecuali diserang China.

Runtuhnya kekuasaan Chen mulai terjadi pada tahun 2006 ketika serangkaian tuduhan korupsi ditimpakan pada anggota keluarganya serta para penasihatnya. Menantunya ditahan pada bulan Juli, lalu istrinya pada bulan November.

Chen sendiri mengalami nasib yang sama setelah tidak berkuasa, 2008, dan tidak memiliki kekebalan hukum lagi. Enam bulan setelah tidak menjadi presiden ia ditahan karena tuduhan korupsi, termasuk juga pencucian uang. Bersama istrinya, ia juga dituduh menggelapkan jutaan dollar dana publik dan menerima suap dalam penjualan tanah.

Secara tegas Chen membantah semua tuduhan itu. Ia menyatakan, tuduhan korupsinya itu berbau politik karena ia keras menentang China. Apa pun pernyataan Chen, pengadilan nanti yang akan menetapkan apa yang sesungguhnya terjadi.

Mengapa para koruptor, termasuk Chen dan juga biasa dinyatakan oleh mereka yang dituduh korupsi di negara-negara lain termasuk di Indonesia, merasa tidak bersalah? Karena banyak orang yang melakukannya! Kalau banyak orang melakukannya, maka korupsi menjadi sebuah kejahatan yang biasa, bahkan dirasakan sebagai hak, hak untuk "korupsi".

Kadang, uang korupsi tidak dimakan sendiri, tetapi juga dinikmati oleh banyak orang, termasuk untuk kepentingan partai. Yah, meskipun yang "dialirkan" ke pihak lain tentu tidak sebanyak yang digunakan sendiri, yang masuk ke kantong sendiri. Meski demikian, dengan mengalirkan uang ke pihak lain, para koruptor merasa seakan telah "membayar" kejahatannya.

Kembali ke Chen Shui-bian. Korupsi telah menghancurkan reputasi Chen yang dibangun bertahun-tahun. Apa yang menimpa Chen bisa menimpa pemimpin di mana pun kalau mereka hanya fokus pada jabatannya dan usaha untuk mempertahankan kedudukannya. (Kompas)

**Jakarta, 15 Desember 2008**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**D e p l u**